

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Fadly Elwa Purwansyah, Syamsurijal Tan dan Erni Achmad
Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi

Abstract. This Research aim a) To analyse infrastructure growth to, market draught irrigation Muaro Jambi Regency Period 2000-2010; b) To analyse infrastructure expense allocation growth and its proportion to totalizing area expense Muaro Jambi Regency Period 2000-2010 c) To know and analyse ready influence infrastructure, market and irrigation to agricultural sector added value Muaro Jambi Regency Period 2000-2010. Result of research indicate that a) During period 2000-2010 infrastructure growth rate in Muaro Jambi Regency is equal to 6,60 percent per year, in same period infrastructure growth rate irrigation in Muaro Jambi Regency equal to 15,70 percent and infrastructure growth natural market growth mean equal to 18,16 percent b) meanly during period 2000-2010 infrastructure expense proportion to area expense equal to 39,85 percent, with growth per year mean equal to 65,32 percent meanly during period 2000-2010 growth agricultural sector added value Muaro Jambi Regency equal to 4,75 percent c) Infrastructure variable street, market and irrigation by together have an effect on positive and signifikan to value added agricultural sector. By parsial infrastructure variable irrigation and street have an effect on by signifikan to agricultural sector added value, but market variable though have an effect on positive but don't signifikan.

Keywords: *infrastructure , agricultural, expense*

Pendahuluan

Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Pembangunan merupakan upaya secara sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Sumber daya bukan tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya tersebut makin meningkat

akibat meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhannya.

Upaya pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi untuk dikembangkan. Potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerah tersebut. Proses pembangunan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diciptakan melalui intervensi pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong terciptanya proses pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab, Pertama, pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur. Kedua, pembangunan perlu diletakkan pada arah pemberdayaan

masyarakat dan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dan ketiga, pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintas sektor mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus. (Sumodiningrat, 2001)

Peranan pemerintah dalam pembangunan daerah adalah (a), *entrepreneur*, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merangsang jalannya suatu usaha bisnis; (b), *koordinator*, yaitu pemerintah daerah sebagai koordinator dalam penetapan suatu kebijakan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah; (c), *fasilitator*, yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional* di daerahnya; (d), *stimulator*, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuhkembangkan investor yang telah ada di daerahnya.

Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu Kabupaten hasil pemekaran yang terbentuk sejak tahun 1999, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, khususnya sektor Pertanian. Potensi sektor pertanian Kabupaten Muaro Jambi potensi sektor pertanian masih sangat besar untuk dikembangkan, mengingat masih banyaknya lahan tidur yang tidak terolah, bahkan menurut catatan Dinas Pertanian pada tahun 2009 luas lahan yang tidak terolah mencapai 275 Ribu Hektar.

Melihat struktur perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi, tergambar bahwa peran sektor pertanian masih sangat dominan. Peran sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan tahun 2009 adalah mencapai 38,24 persen

dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, dan sebesar 46,54 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Besarnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi ternyata belumlah diikuti secara riil infrastruktur di lapangan, khususnya yang berperan dalam memperlancar arus produksi di sentra-sentra pertanian.

Secara khusus bagi kabupaten Muaro Jambi dampak dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Tahun 2000 PDRB sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar Rp. 255.293.010.000, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp. 405.664.140.000 atau selama kurun waktu 2000-2010 PDRB sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata 4,75 persen.

Selama periode 2000-2010, belanja infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari Rp. 7.546.620.000 pada tahun 2000 menjadi Rp. 302.562.002.000 pada tahun 2010. Proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 39,85 persen. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur telah mampu meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai gambaran panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi yang pada tahun 2000 hanya sepanjang 751 Km mengalami peningkatan menjadi 1.384,5 Km pada tahun 2010. Peningkatan infrastruktur tidak hanya terjadi terhadap jalan saja, infrastruktur irigasi sebagai pendukung kegiatan pertanian juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2000 hanya sebanyak 32 unit, kemudian tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat pesat menjadi 126 unit. Peningkatan juga terjadi pada infrastruktur pasar, dimana tahun 2000 jumlah pasar di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebanyak 4 lokasi, kemudian sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 17 unit.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan infrastruktur jalan, irigasi dan pasar di Kabupaten Muaro Jambi Periode 2000-2010, Untuk menganalisis perkembangan alokasi belanja infrastruktur dan proporsinya terhadap total belanja daerah di Kabupaten Muaro Jambi Periode 2000-2010 dan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyediaan infrastruktur jalan, irigasi dan pasar terhadap nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi Periode 2000-2010.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan/ berkala (*time series*) mulai tahun 2000-2010. Jenis data yang digunakan adalah a) Data Infrastruktur jalan, b) Data infrastruktur irigasi c) data infrastruktur pasar d) data belanja infrastruktur e) Nilai tambah sektor pertanian. Sumber data dalam penelitian berasal dari a) BPS Kabupaten Muaro b) Bappeda Kabupaten Muaro Jambi serta Instansi lain yang terkait.

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua maka digunakan analisis deskriptif. Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan secara deskriptif terhadap variabel-variabel yang hanya dirumuskan dan mengumpulkan data dengan cara menginterpretasikan sehingga memberikan suatu keterangan gambaran yang ada. Untuk menghitung perkembangan infrastruktur dan belanja langsung di Kabupaten Muaro Jambi , yaitu :

$$VA_i = \frac{VA_{ti} - VA_{ti-1}}{VA_{ti-1}} \times 100\%$$

Dimana :

VA_i = Pertumbuhan tahun t

VA_{ti} = Data tahun t

VA_{ti-1} = Data tahun t-1

Untuk proporsi belanja infrastruktur terhadap pengeluaran daerah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Prop = \frac{B_{IF}}{BT} \times 100\%$$

Dimana :

Prop = Proporsi belanja Infrastrukturu tahun t

B_{IF} = Belanja Infrastruktur

BT = Belanja Total

Untuk menjawab permasalahan ke tiga yaitu untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi digunakan alat analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data time series selama periode 2000-2009, dengan model persamaan

$$NTP = f(X_1, X_2, X_3, e)$$

$$NTP = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + U$$

Dimana :

NTP = Nilai tambah sektor pertanian di Kabupatren Muaro Jambi

α₀ = konstanta

X₁ = Panjang Jalan (Km)

X₂ = Irigasi (Unit)

X₃ = Pasar (unit)

α₁ - α₃ = Koefisien Regresi

u = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Infrastuktur Jalan

Kabupaten Muaro Jambi yang ada di Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan guna mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Kebijakan pembangunan tersebut tertuang dalam Program Pembangunan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Melalui kebijakan tersebut tidak hanya akan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi, namun juga terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan akan kemiskinan.

Bagi Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi yang sangat strategis sebagai

lalu lintas barang dan jasa untuk kota-kota besar yang berada dalam alur lintas Timur Pulau Sumatera, memiliki peran sangat penting sebagai wilayah yang mendukung mobilitas barang dan jasa. Dengan kondisi yang sangat strategis ini, transportasi darat sangat penting dari dan menuju Kabupaten Muaro Jambi. Apabila sarana transportasi darat memadai maka jalur perhubungan laut dan darat akan menghubungkan daerah Sumatera, khususnya yang berada di Pantai Timur Pulau Sumatera terangkum dalam satu jalur perhubungan.

Melihat posisi yang sangat strategis ini maka pembangunan jalan sangat penting guna mendorong percepatan pembangunan wilayah baik dari sisi regional maupun wilayah, termasuk bagi Kabupaten Muaro Jambi sendiri sebagai salah satu daerah sentra perkebunan dari berbagai komoditas. Kondisi infrastruktur jalan darat yang memadai bukan hanya akan mendorong mobilitas barang dan jasa dari dan menuju Kabupaten Muaro Jambi, tetapi lebih jauh dapat mendukung percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan efisiensi ekonomi, khususnya pada daerah sentra produksi hasil pertanian.

Selama periode 2000-2010 perkembangan infrastruktur jalan darat di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Infrastruktur jalan secara kuantitas menunjukkan trend yang meningkat, meskipun beberapa tahun mengalami stagnasi dalam perkembangannya. Tahun 2001 laju pertumbuhan kuantitas infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 20,51 persen. Angka pertumbuhan ini cukup tinggi dan menempati peringkat ke dua dalam pencapaian laju pertumbuhan jalan setelah tahun 2008 sebesar 23,39 persen. Tingginya angka pertumbuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro sebagai akibat adanya transfer dana pusat untuk pembangunan daerah, karena sejak tahun 2001 setiap daerah memperoleh dana perimbangan yang dapat digunakan untuk

membayai pembangunan daerahnya sendiri, termasuk dalam menyediakan infrastruktur jalan.

Tahun 2002-2003 laju pertumbuhan kuantitas infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami stagnasi atau tidak mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang lebih memilih memperbaiki jalan yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas jalan, sementara pada tahun 2004 perkembangan kuantitas jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan tipis, yaitu sebesar 0,22 persen atau mengalami penambahan panjang jalan sebesar 2 Km.

Tahun 2005 perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi sedikit mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,38 persen atau mengalami penambahan panjang jalan sebesar 30,7 Km. Penambahan panjang jalan ini, khususnya di daerah-daerah yang terisolir, yaitu dengan membuka akses yang menghubungkan daerah-daerah terpencil. Tahun 2006 terjadi penambahan kuantitas jalan di Kabupaten Muaro Jambi sepanjang 71,1 Km atau mengalami peningkatan sebesar 7,50 persen. Peningkatan panjang jalan pada tahun ini lebih disebabkan karena pembukaan akses jalan antar desa dengan Kecamatan. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2006, maka pada tahun 2007 infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan sebesar 1,59 persen atau mengalami penambahan sepanjang 16 Km.

Tahun 2008 terjadi pertumbuhan panjang jalan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 23,39 persen atau terjadi penambahan panjang sebesar 239,5 Km, tingginya laju pertumbuhan panjang jalan pada tahun ini tidak terlepas dari peningkatan belanja infrastruktur yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan lebih besar, sementara pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan infrastruktur jalan sebesar 1,64 persen atau

mengalami pertambahan sebesar 20,7 Km dan pada tahun 2010 panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan sebesar 7,81 persen. Secara rata-rata selama periode 2000-2010 panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan 6,60 persen.

Meskipun panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, bukan berarti secara kualitas juga mengalami perbaikan atau peningkatan. Proporsi jalan yang layak dilalui dengan baik memiliki proporsi yang rendah dan menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi, begitu juga dengan proporsi jalan pada kualitas sedang, rusak dan rusak berat pada umumnya menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Adanya fluktuasi kualitas jalan menunjukkan sebab akibat. Secara topografis sebagian besar wilayah Kabupaten Muaro Jambi berada di sepanjang alur sungai Batang Hari, sehingga hampir setiap tahun mengalami banjir dan sangat berpotensi merusak jalan dan jembatan yang ada, di samping itu di beberapa daerah seperti di Kecamatan Kumpeh, Mestong, Sungai Bahar dan Kecamatan Sekernan kegiatan ilegal logging masih marak, sehingga menjadi penyebab rusaknya jalan-jalan yang ada di Kecamatan tersebut. Faktor yang cukup krusial tentu saja adalah masalah dana perbaikan infrastruktur jalan yang tidak mampu membiayai perbaikan jalan secara keseluruhan, sehingga apabila di suatu lokasi diperbaiki, maka di lokasi lain mengalami kerusakan.

Pengaruh Infrastruktur Terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi

Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 121.984 + 124,146 X_1 + 1.949,762 X_2 + 10,650 X_3 + e$$

T hitung (3,318) (3,113) (0,892)
F hitung = 101,48 R² = 0,978

Berdasarkan model persamaan regresi di atas tergambar bahwa, variabel infrastruktur jalan, irigasi dan pasar

memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai tambah pada sektor pertanian. Apabila digali lebih dalam ternyata peran pasar di Kabupaten Muaro Jambi tidak terlalu signifikan karena memiliki nilai t hitung lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel. Karena pada umumnya hasil komoditi pasar petani tidak langsung di jual ke pasar-pasar tradisional yang ada di desa atau Kecamatan. Untuk skala lebih besar petani biasanya lebih memilih menjual hasil usaha taninya di pasar-pasar induk yang ada di Kota Jambi, hal ini sangat dimungkinkan karena letak Kabupaten Muaro Jambi yang tidak terlalu jauh dari Kota Jambi. Pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muaro Jambi pada umumnya justru dipasok dari pasar-pasar induk yang ada di Kota Jambi.

Satu hal yang harus dicatat dari model persamaan regresi berganda di atas adalah bahwa model persamaan regresi linear berganda di atas bukanlah model yang shahih, karena terdapat adanya multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dari terdapatnya nilai-nilai t hitung yang tidak signifikan, sehingga menjadi bias apabila ditafsirkan, namun paling tidak model persamaan regresi di atas menjadi rujukan bahwa peran infrastruktur daerah sangat penting mendorong peningkatan nilai tambah sektoral.

KESIMPULAN

Selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 6,60 persen per tahun, dalam periode yang sama laju pertumbuhan infrastruktur irigasi di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 15,70 persen dan pertumbuhan infrastruktur pasar mengalami pertumbuhan rata-rata 18,16 persen.

Secara rata-rata selama periode 2000-2010 proporsi belanja infrastruktur terhadap belanja daerah adalah sebesar 39,85 persen, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun adalah sebesar 65,32 persen

Secara rata-rata selama periode 2000-2010 pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 4,75 persen.

Variabel infrastruktur jalan, irigasi dan pasar secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah pada sektor pertanian. Secara parsial variabel infrastruktur jalan dan irigasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tambah sektor pertanian, namun variabel pasar meskipun berpengaruh positif namun tidak signifikan. Variasi naik turunnya variabel nilai tambah sektor pertanian mampu dijelaskan oleh variabel infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi dan infrastruktur pasar sebesar 97,8 persen, di sisi lain sisanya sebesar 2,2 persen di jelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Burhanudin, 1996, Pengembangan Industri Berbasis Teknologi, ITB, Bandung.
- Arifin, A.S.M. 1997. Dampak Pengembangan Kegiatan Industri Terhadap Pengembangan Perekonomian Pedesaan, ITB, Bandung.
- Arsyad, L, 1997, Ekonomi Pembangunan, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Aziz, Iwan. J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia, LPFE-UI, Jakarta.
- Dombush dan Fisher, 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firman, T. 1985. Regional In equities dan Pengembangan Wilayah, ITB Bandung.
- Friedman, I & W. Alonso. 1985. Regional Development and Planning, MIT Press Massachusset.
- Habibi, 1986, Pemikiran dan Arah Kebijakan Pembangunan Seminar Nasional, Unpad, Bandung.
- Kartono, 1987. Dampak Lokasi Industri Manufakturing dalam Pembangunan Wilayah, Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Seminar Nasional, LP FE-UI, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2000, Ekonomi Pembangunan, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Kurnia, I.N. 1998. Peranan Industri Kecil Terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat di Kab. Banyumas Jawa Timur, IPB, Bogor.
- Marhaini, 1992. Peranan Pariwisata Bahorok Bukit Lawang Terhadap Pengembangan Wilayah Kab. Langkat, Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Mangkusobroto, Guritno, 1993, Ekonomi Publik, LP FE-UI, Jakarta.
- Musgrave dan Richard, A. 1989, Keuangan Negara, Teori dan Praktek, LP FE-UI, Jakarta.
- Sahara, 1999. Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah. Khususnya Ibukota Jakarta, IPB, Bogor.
- Soemitro Djoyohadikusumo, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, LP3ES, Jakarta.
- Soepono, P. 1993. Analisis Shift Share Perkembangan dan Penerapan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI) No. I Tahun III.
- Sukirno, 2004, Ekonomi Pembangunan, Penerbit LP FE-UI, Jakarta.
- Syahroni, 1998. Studi Identifikasi Sektor ekonomi Potensial Bagi Pengembangan Wilayah Jawa Barat, Pasca Sarjana ITB, Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1989. Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Todaro, M.P. 1997. Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga edisi Keenam. Alih Bahasa oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Usman, 1991. Peranan Sektor Industri Kecil dan Kerajinan dalam rangka Pembangunan Wilayah Kabupaten Langkat Sumut, Pasca Sarjana IPB, Bogor.